



## Collaborative Governance dalam Pengembangan Agrowisata Belimbing Desa Ngringinrejo Bojonegoro

Zalfaa' Fairuuz<sup>1)</sup>, Kalvin Edo Wahyudi<sup>2)</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

zalfafairuz33@gmail.com<sup>1)</sup>  
kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id<sup>2)</sup>

### Abstrak

Pengembangan agrowisata menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat potensi lokal. Agrowisata Belimbing di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, berkembang melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi antaraktor dalam pengembangan agrowisata menggunakan kerangka Collaborative Governance dari Ansell dan Gash, yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor berjalan cukup baik, berdampak positif pada peningkatan ekonomi lokal, memperkuat hubungan antaraktor, dan meningkatkan citra desa sebagai kawasan agrowisata. Kepercayaan terbentuk melalui interaksi sosial dan kesamaan tujuan, meskipun intensitas dialog tatap muka dan koordinasi rutin menurun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme komunikasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan transparansi antaraktor merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi antaraktor dalam pengembangan Agrowisata Belimbing. Dengan upaya tersebut, kolaborasi dapat terus berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat serta perkembangan destinasi wisata secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Agrowisata, Belimbing, Collaborative Governance, Ngringinrejo, Partisipasi Masyarakat.

### Abstract

*The development of agrotourism serves as a strategy to improve community welfare while strengthening local potential. The Belimbong Agrotourism in Ngringinrejo Village, Kalitidu District, Bojonegoro Regency has grown through the involvement of multiple stakeholders. This study aims to analyze the collaborative processes among actors in the development of the agrotourism area by applying the Collaborative Governance framework proposed by Ansell and Gash, which includes face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the collaboration among actors is generally well established, contributing positively to the local economy, strengthening relationships among stakeholders, and enhancing the village's image as an agrotourism destination. Trust develops through social interactions and shared objectives, although the frequency of face to face meetings and routine coordination has decreased. The study concludes that strengthening communication mechanisms, improving community participation, and ensuring transparency among actors are crucial steps to sustain collaborative efforts in developing Belimbong Agrotourism. These efforts enable collaboration to remain effective and continue delivering long term benefits for both the community and the sustainability of the tourism destination.*

**Key words:** Agritourism, Collaborative Governance, Community Participation, Ngringinrejo, Starfruit



## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat pembangunan berbasis masyarakat, menempatkan desa sebagai pusat penggerak pembangunan lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan penting bagi penguatan peran desa dalam pembangunan, karena melalui regulasi ini pemerintah desa memperoleh kewenangan lebih luas untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri (Rosyanti, Eldo, dan Novanto 2019). Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan pemanfaatan Dana Desa yang diarahkan pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, yang menekankan pada program penanggulangan kemiskinan dengan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai), penguatan ketahanan pangan, operasional pemerintahan desa, serta pengembangan potensi desa. Salah satu bentuk pengembangan potensi desa yang didorong melalui pemanfaatan Dana Desa adalah desa wisata.

Dalam Lestari dan Azis (2022) desa wisata adalah desa yang memiliki keunikan serta daya tarik tersendiri, baik dari aspek lingkungan alam pedesaan maupun dari kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Potensi tersebut kemudian dikembangkan dan dikemas secara menarik melalui penyediaan fasilitas pendukung wisata dalam tata ruang yang harmonis serta pengelolaan yang terencana. Dengan pengelolaan yang baik, desa wisata mampu menerima kunjungan wisatawan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi pariwisata yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Desa wisata merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan desa wisata dipandang efektif sebagai penggerak ekonomi lokal karena membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola daya tarik wisata, produk unggulan desa, serta aktivitas budaya yang menjadi identitas wilayah tersebut. Lestari dan Azis (2022) menjelaskan bahwa desa wisata memberi ruang kemandirian bagi masyarakat dalam mengelola potensi desa, sekaligus menjadi program yang secara langsung melibatkan mereka dalam seluruh proses pengembangannya.

Salah satu implementasi pengembangan potensi desa melalui sektor pariwisata adalah Agrowisata Belimbang di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Kawasan ini mulai dikembangkan sejak 2011 sebagai respons atas seringnya gagal panen palawija di bantaran Sungai Bengawan Solo, sehingga masyarakat bersama pemerintah desa mengalihfungsikan lahan menjadi kebun belimbang. Inisiatif tersebut tidak hanya berhasil meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperluas peluang ekonomi masyarakat hingga kemudian diresmikan sebagai objek wisata oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Saat ini, kawasan agrowisata mencakup 20,8 hektare lahan dengan melibatkan 102 petani, serta mengembangkan berbagai varietas belimbang seperti songkok, dewo, dan legnan. Pengelolaan kawasan dilakukan oleh BUMDes Tirta Abadi bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sehingga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pengembangan atraksi wisata, pemasaran produk, dan penyediaan layanan pendukung.

Menurut Suwena & Widyatmaja (2017) dalam Febrianti, Fauziyah, dan Destiarni (2024), wisatawan masa kini cenderung mencari pengalaman yang unik, atraktif, dan memberikan kualitas pengalaman berwisata. Prinsip ini diterapkan dalam Agrowisata Belimbang Ngringinrejo, di mana pengelola tidak hanya mengandalkan kualitas buah belimbang, tetapi juga melakukan inovasi melalui penyediaan wisata edukatif, fasilitas bermain anak, paket *outbound*, serta penyelenggaraan hiburan seperti *live music*, festival belimbang tahunan, dan tradisi sedekah bumi yang menghadirkan gunungan belimbang untuk pengunjung. Seiring perkembangan tersebut, Agrowisata Belimbang Ngringinrejo ini telah meraih berbagai penghargaan seperti Juara Pertama Kategori Wisata Buatan dalam Penghargaan Anugerah Wisata Jawa Timur 2014. Agrowisata Belimbang melalui Kelompok Tani Mekar Sari juga meraih Juara Dua dalam kompetisi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura kategori agribisnis buah tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pada Festival Dewi Cemara 2023, agrowisata ini kembali menjadi juara terbaik kategori stan



terbaik, kegiatan yang diselenggarakan oleh Disbudpar Jatim sebagai bagian dari perayaan Nawa Bhakti Satya Jatim Bhakti ke-9 (*Jatim Harmony*). Penghargaan-penghargaan tersebut menegaskan peran penting Agrowisata Belimbing Ngringinrejo dalam pengembangan ekonomi lokal dan penguatan identitas daerah.

Keberhasilan Agrowisata Belimbing Ngringinrejo tidak terlepas dari keterlibatan berbagai aktor. sejumlah aktor sesuai perannya masing-masing. Pemerintah desa berperan melalui penetapan kebijakan dan pembinaan kepada masyarakat. BUMDes Tirta Abadi bersama Pokdarwis menjalankan fungsi pengelolaan kawasan, mencakup operasional serta promosi wisata. Disbudpar Kabupaten Bojonegoro memberikan pendampingan dan pelatihan. Adapun petani dan pedagang menjadi aktor penting melalui produksi belimbing dan kegiatan usaha yang memanfaatkan kawasan agrowisata. Sejak tahun 2022, penguatan kolaborasi juga tercermin dari keterlibatan sektor swasta, yakni PT Petrokimia Gresik, yang menyediakan demplot pupuk dan pendampingan teknis bagi petani sebagai respons terhadap kelangkaan pupuk pascapandemi. Kehadiran aktor swasta ini menunjukkan bahwa keberlanjutan agrowisata tidak hanya bergantung pada peran pemerintah dan masyarakat, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor untuk menjaga kualitas produksi sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Namun demikian, dinamika kolaborasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Pergantian pengelola memengaruhi stabilitas tata kelola dan berdampak pada menurunnya intensitas komunikasi antara pengelola, petani, dan pedagang. Seorang pedagang bahkan menyatakan bahwa pertemuan rutin yang sebelumnya menjadi wadah penyampaian aspirasi kini tidak lagi dilaksanakan ([radarbojonegoro.jawapos.com](http://radarbojonegoro.jawapos.com), 2024). Kondisi ini menggambarkan mulai melemahnya efektivitas koordinasi dan harmonisasi antaraktor, yang apabila tidak segera diperbaiki berpotensi menghambat keberlanjutan serta manfaat ekonomi dari agrowisata.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang mampu memperkuat koordinasi serta menyelaraskan berbagai kepentingan dalam pengelolaan Agrowisata Belimbng Ngringinrejo. Pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi penting karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Sejalan dengan penelitian Buchari et al. (2024) yang menemukan bahwa kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengembangan agrowisata di Indonesia. Dengan demikian, penerapan tata kelola kolaboratif menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika kerja sama antaraktor dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Kusuma dan Wahyudi (2023) mengenai pengembangan Wisata Kampung Pecinan di Kecamatan Simokerto, Surabaya, yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta mampu meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperkuat identitas budaya lokal melalui pengelolaan bersama. Pendekatan serupa juga tampak pada penelitian Anugrah dan Wahyudi (2025) mengenai pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, pelaku UMKM, dan masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan wisata berbasis komunitas, sekaligus memperkuat kontribusi tata kelola kolaboratif terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Meskipun kajian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan agrowisata semakin berkembang, sebagian penelitian masih berfokus pada aspek partisipasi masyarakat secara umum tanpa mengulaskan proses kolaboratif secara komprehensif berdasarkan kerangka teoritis yang sistematis. Misalnya, studi Matthoriq et al. (2021) di Kota Batu menemukan bahwa meskipun kolaborasi antaraktor telah terbangun, mekanisme formal pengambilan keputusan bersama serta sistem koordinasi masih belum optimal. Dengan demikian, terdapat research gap berupa keterbatasan studi yang menguraikan tahapan proses kolaborasi secara mendalam, khususnya menggunakan kerangka *Collaborative Governance in Theory and Practice* (Ansell & Gash, 2008) dalam konteks agrowisata di Indonesia.

Menanggapi celah tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) melalui penerapan model *Collaborative Governance Framework* dari Ansell dan Gash (2008) untuk menganalisis



proses kolaborasi dalam pengembangan Agrowisata Belimbing Ngringinrejo, Bojonegoro. Kerangka ini memungkinkan kajian mendalam terhadap tahapan kolaborasi, mulai dari dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen bersama (*commitment to the process*), kesepahaman bersama (*shared understanding*), hingga capaian sementara (*intermediate outcomes*). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa pengayaan literatur *Collaborative Governance* dalam sektor agrowisata, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, BUMDes, pokdarwis, dan sektor swasta dalam memperkuat sinergi lintas aktor guna mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menelaah proses *collaborative governance* dalam pengembangan Agrowisata Belimbing di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam interaksi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan agrowisata secara kontekstual dan alami. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* karena Desa Ngringinrejo memiliki karakteristik kolaborasi lintas sektor yang menarik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, dan pihak swasta. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta penelusuran dokumen. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive* dan dikembangkan melalui *snowball*, mencakup Kepala Desa, Koordinator Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Kabupaten Bojonegoro, Ketua BUMDes Tirta Abadi, Ketua Pokdarwis, *Assistant Executive Account* PT Petrokimia Gresik, perwakilan petani, serta perwakilan pedagang. Analisis data dilakukan dengan model interaktif *Miles and Huberman* (1994) dalam Sugiyono (2023), mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sehingga data yang dihasilkan tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Agrowisata Belimbing di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Analisis menggunakan kerangka Ansell dan Gash (2008) dalam Astuti et al. (2020), proses kolaborasi terdiri dari lima tahapan utama, yaitu *face to face dialog* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitment to the process* (komitmen terhadap proses), *shared understanding* (pemahaman bersama), dan *intermediate outcomes* (hasil sementara). Kelima tahapan ini menjadi acuan dalam menganalisis dinamika, tantangan, dan capaian kolaborasi di Agrowisata Belimbing Ngringinrejo.

### 1. Face to Face Dialog (Dialog Tatap Muka)

Dialog tatap muka merupakan elemen penting dalam kerangka *Collaborative Governance* karena menjadi sarana komunikasi langsung antar *stakeholder* untuk membangun pemahaman bersama dan menyamakan persepsi terhadap tujuan kolaborasi. Menurut Ansell dan Gash (2008), dialog tatap muka berperan strategis dalam memfasilitasi pertukaran informasi serta membangun kepercayaan di antara para aktor yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan dialog tatap muka di Agrowisata Belimbng Ngringinrejo telah berlangsung sejak awal pembentukan agrowisata dan pada mulanya dilakukan secara rutin, namun dalam perkembangannya frekuensi dialog tersebut menurun dan kini cenderung bersifat insidental, umumnya hanya dilakukan ketika muncul program baru atau persoalan yang memerlukan penyelesaian bersama.

Menurut Thian (2021:164) dalam Kanita, Widowati, dan Maesaroh (2023), komunikasi merupakan proses penyampaian dan pemahaman pesan melalui berbagai bentuk dan media. Dalam pengembangan Agrowisata Belimbng Ngringinrejo, komunikasi telah terjalin baik melalui pertemuan langsung maupun interaksi melalui media *digital*, namun menurunnya intensitas tatap



muka menyebabkan proses pemahaman dan interaksi menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan pandangan Hidayatullah, Purnaweni, dan Yuwono (2023) bahwa komunikasi langsung berperan penting dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan dan mencegah konflik. Di Agrowisata Belimbing Ngringinrejo, absennya forum rutin menyebabkan pengambilan Keputusan semakin terpusat pada BUMDes dan Pokdarwis, sementara pelibatan petani dan pedagang menjadi bersifat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme deliberatif sebagaimana digambarkan oleh Ansell dan Gash (2008) belum sepenuhnya terwujud.

Dialog tatap muka memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana saling menghormati antar pemangku kepentingan melalui komunikasi terbuka yang dapat meminimalisir ketegangan dan kesalahpahaman (Novriansyah et al., 2021). Dalam konteks Agrowisata Belimbing Ngringinrejo, meskipun komunikasi masih berlangsung melalui media digital, absennya forum tatap muka secara rutin berpotensi melemahkan hubungan emosional dan rasa saling menghargai antaraktor. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *face to face dialogue* di Ngringinrejo belum berjalan optimal karena menurunnya intensitas deliberasi bersama. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran menuju pola komunikasi yang lebih fleksibel namun belum efektif dalam membangun kepercayaan, sehingga diperlukan revitalisasi forum tatap muka secara berkala untuk memperkuat koordinasi, partisipasi, dan keberlanjutan kolaborasi antaraktor.

## 2. **Trust Building (Membangun Kepercayaan)**

Menurut De Seve dalam Arianti dan Satlita (2018), salah satu indikator utama keberhasilan *Collaborative Governance* adalah adanya rasa saling percaya di antara para aktor yang terlibat. Kepercayaan ini tumbuh dari hubungan profesional maupun sosial yang terjalin, serta keyakinan bahwa setiap pihak dapat diandalkan dalam hal informasi, komitmen, dan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kerja sama yang dibangun, tetapi juga oleh kualitas hubungan dan keyakinan timbal balik antaraktor dalam jaringan kolaborasi tersebut.

Dalam konteks pengembangan Agrowisata Belimbing Ngringinrejo, prinsip tersebut tercermin dari adanya rasa saling percaya antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah desa mempercayakan pengelolaan teknis kepada BUMDes dan Pokdarwis, sementara masyarakat memberikan kepercayaan terhadap arah kebijakan yang ditetapkan pengelola agrowisata. Di sisi lain, pihak swasta seperti PT Petrokimia Gresik juga menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap program kolaborasi karena meyakini konsistensi pemerintah desa dan pengelola dalam menjaga keberlanjutan kegiatan. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas kerja sama antaraktor.

Namun, kepercayaan tidak bersifat statis. Ngadimin (2018) dalam Novriansyah et al. (2021) menegaskan bahwa membangun kepercayaan dalam kolaborasi merupakan proses jangka panjang yang memerlukan komunikasi intensif, adaptasi, dan kesinambungan interaksi. Dalam kasus Agrowisata Belimbing Ngringinrejo, komunikasi digital melalui *WhatsApp* memang membantu menjaga hubungan, tetapi menurunnya frekuensi pertemuan tatap muka mengurangi kedekatan dan menurunkan kepercayaan sebagian masyarakat khususnya pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa *trust building* belum sepenuhnya stabil dan masih rentan melemah ketika transparansi dan komunikasi langsung berkurang. Karena itu, penguatan forum tatap muka dan konsistensi keterbukaan informasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kepercayaan tetap terjaga dan kolaborasi berjalan efektif.

## 3. **Commitment to The Process (Komitmen Terhadap Proses)**

Menurut Ansell dan Gash (2008), *commitment to process* atau komitmen terhadap proses merupakan keseriusan para pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dan konsisten dalam setiap tahapan kolaborasi. Komitmen tidak hanya sebatas keikutsertaan formal dalam kegiatan, tetapi juga tercermin dari keberlanjutan tindakan dan kontribusi nyata menuju tujuan bersama.



Temuan penelitian menunjukkan komitmen tersebut hadir dalam berbagai bentuk dan ditunjukkan oleh seluruh aktor yang terlibat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komitmennya melalui pendampingan dan pelatihan wisata. Pemerintah desa berfokus pada pemeliharaan sarana prasarana serta dukungan regulatif. BUMDes Tirta Abadi bersama Pokdarwis berperan menjalankan operasional kawasan dan melakukan inovasi pengelolaan. Pihak swasta, PT Petrokimia Gresik konsisten memberikan dukungan teknis melalui pelatihan petani dan demplot pupuk tahunan. Sementara itu, masyarakat baik petani maupun pedagang menunjukkan komitmen individu dalam menjaga produktivitas pertanian serta aktivitas ekonomi di kawasan wisata. Variasi peran tersebut memperlihatkan bahwa komitmen kolektif menjadi kekuatan yang menggerakkan keberlangsungan kolaborasi di Ngringinrejo.

Sebagaimana dijelaskan oleh Novriansyah et al. (2021), komitmen tumbuh seiring dengan meningkatnya keterlibatan dan rasa memiliki antaraktor, sehingga memperkuat kesediaan mereka bekerja sama. Hal ini sejalan dengan pandangan Hidayatullah et al. (2023) yang menegaskan bahwa komitmen terhadap tujuan bersama adalah kunci efektivitas kolaborasi, karena hanya dengan rasa tanggung jawab bersama koordinasi dapat berjalan selaras. Prinsip tersebut juga ditegaskan oleh Arianti dan Satlita (2018) yang menyebutkan bahwa komitmen anggota merupakan faktor paling krusial dalam memperlancar proses kolaboratif. Dengan demikian, komitmen terhadap proses dalam pengembangan Agrowisata Belimbing Ngringinrejo dapat dikatakan kuat karena seluruh aktor menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab bersama yang tercermin pada tindakan nyata dalam mempertahankan keberlanjutan agrowisata.

#### 4. Share Understanding (Pemahaman Bersama)

Menurut Ansell dan Gash (2008), keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada sejauh mana para pemangku kepentingan memiliki pemahaman bersama terhadap nilai, tujuan, dan kepentingan yang ingin dicapai. Kesamaan persepsi ini penting untuk mencegah perbedaan kepentingan yang dapat menghambat proses kolaboratif. Sejalan dengan hal tersebut, Novriansyah et al. (2021) menjelaskan bahwa *shared understanding* dapat diwujudkan dalam bentuk kesamaan visi, misi, serta pandangan ideologis antaraktor, yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap tujuan bersama, Sedangkan, Kanita et al. (2023) menambahkan bahwa kesamaan pemahaman dapat dibangun melalui proses diskusi dan pencarian solusi secara kolektif.

Dalam konteks pengembangan Agrowisata Belimbing Ngringinrejo, kesamaan pemahaman antaraktor tercermin dari komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat identitas desa melalui pariwisata berbasis pertanian. Keselarasan visi tersebut tidak hanya terlihat dalam praktik, tetapi juga diformalkan dalam dokumen AD/ART BUMDes sebagai pedoman kerja dalam pengelolaan agrowisata. Hal ini menunjukkan bahwa *shared understanding* telah menjadi dasar penting bagi setiap langkah yang diambil dalam proses kolaboratif.

Selain itu, komunikasi yang intens antara pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, dan pihak swasta seperti PT Petrokimia Gresik menciptakan proses *sense-making* kolektif yang memperkuat kesamaan arah kolaborasi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait teknis pengelolaan wisata antara pengelola dan masyarakat, seluruh pihak tetap berpegang pada tujuan utama, yaitu kemajuan agrowisata dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan Ansell dan Gash (2008), kesamaan pemahaman yang dibangun melalui komunikasi dan refleksi bersama menjadi landasan penting bagi stabilitas serta keberlanjutan proses kolaboratif di Agrowisata Belimbing Ngringinrejo.

#### 5. Intermediate Outcome (Hasil Sementara)

Menurut Ansell dan Gash (2008), hasil sementara (*intermediate outcomes*) merupakan bukti nyata dari proses kolaborasi yang berperan penting dalam membangun momentum menuju keberhasilan bersama. Arianti dan Satlita (2018) menegaskan bahwa kolaborasi akan lebih mudah terbentuk apabila tujuan yang ingin dicapai jelas dan manfaatnya dapat dirasakan secara



konkret oleh seluruh pihak. Kejelasan tujuan dan adanya hasil nyata inilah yang mendorong partisipasi, menumbuhkan rasa percaya, serta menjaga keberlanjutan hubungan antaraktor dalam proses kolaboratif.

Sejalan dengan itu, Vangen dan Huxham dalam Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan-keberhasilan kecil atau *small wins* dalam kolaborasi berfungsi sebagai *positive feedback* yang memperkuat komitmen dan kepercayaan antaraktor. Dalam konteks Agrowisata Belimbing Ngringinrejo, berbagai capaian seperti penghargaan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta keberhasilan promosi hingga tingkat nasional dan internasional menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor telah berjalan efektif. Keberhasilan tersebut memperlihatkan bahwa para aktor baik pemerintah, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, maupun pihak swasta telah memahami dan mewujudkan tujuan kolaborasi secara bersama-sama. Selain itu, manfaat ekonomi yang dirasakan oleh petani dan pelaku usaha lokal memperlihatkan hasil konkret dari proses kolaboratif tersebut. Peningkatan harga jual belimbing dan terbukanya peluang usaha baru menunjukkan bahwa kolaborasi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini juga memberikan keuntungan strategis bagi pihak swasta seperti PT Petrokimia Gresik, baik sebagai sarana promosi maupun penguatan citra perusahaan sebagai perusahaan solusi agroindustri yang peduli terhadap kemajuan pertanian nasional. Dengan demikian, capaian-capaian ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan sementara, tetapi juga menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antaraktor dalam mencapai tujuan jangka panjang, yaitu pengembangan Agrowisata Belimbing Ngringinrejo yang berkelanjutan dan berdaya saing (Arianti dan Satlita 2018).

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menggambarkan proses *collaborative governance* dalam pengembangan Agrowisata Belimbng di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi pengembangan wisata serta kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kolaborasi telah mencakup unsur dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, serta penyamaan persepsi yang diarahkan pada tujuan peningkatan ekonomi desa dan penguatan identitas lokal sebagai kawasan agrowisata berbasis pertanian. Meskipun dalam perkembangannya terdapat dinamika seperti menurunnya intensitas pertemuan tatap muka dan belum meratanya pelibatan masyarakat, kolaborasi tetap menghasilkan manfaat nyata seperti peningkatan pendapatan warga, penguatan hubungan antaraktor, serta pengakuan eksternal melalui penghargaan dan perluasan jejaring pariwisata. Dengan demikian, proses *collaborative governance* dalam pengembangan agrowisata ini secara umum telah menjawab tujuan penelitian, sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi lintas aktor menjadi faktor kunci keberlanjutan destinasi berbasis potensi lokal.

Untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas kolaborasi ke depan, diperlukan peningkatan intensitas komunikasi melalui pengaktifan kembali forum pertemuan rutin sebagai media diskusi, koordinasi, dan evaluasi bersama. Pengelola juga perlu memperkuat pelibatan masyarakat khususnya petani dan pelaku usaha dalam setiap proses pengambilan keputusan agar partisipasi dan rasa memiliki terhadap agrowisata semakin meningkat. Transparansi dalam penyampaian informasi dan pengelolaan kegiatan juga penting dijaga guna memperkuat kepercayaan serta mencegah potensi kesalahpahaman antarpihak dalam proses kolaborasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Ilman Nur. 2020. "Strategi Pemasaran Pariwisata ke Asia Tenggara oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur Tahun 2018-2020." UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Alamsyah, Dwi, Nuryanti Mustari, Rudi Hardi, dan Ansyari Mone. 2019. "Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba



- Kabupaten Luwu Utara." FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 04(02):112–27.
- Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4):543–71. doi: 10.1093/jopart/mum032.
- Anugrah, S. D., & Wahyudi, K. E. (2025). Collaborative Governance Analysis dalam Optimalisasi Objek Wisata Gronjong Wariti di Kabupaten Kediri. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(3), 400–417.
- Arianti, Devi, dan Lena Satlita. 2018. "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul." *Natapraja* 6(2):195–208.
- Astuti, Retno Sunu, Warsono Hardi, dan Abd Rachim. 2020. Collaborative Governance (Dalam Perspektif Administrasi Publik). cetakan pe. diedit oleh T. D. Press. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Buchari, B., Firdaus, R., & Rachmawati, E. (2024). *Community empowerment strategy in developing agrotourism village in Kuningan Regency, West Java*. Jurnal Governance dan Sosial Politik, 5(1), 45–58. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/11550>
- Dwiyanto, Didiek, dan Agus Supriyanto. 2022. "Pengembangan Desa Wisata di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dalam Perspektif Collaborative Governance." *jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2(2):1–11.
- Febrianti, Salsabila Atikah, Elys Fauziyah, dan Resti Prastika Destiarni. 2024. "Preferensi Wisatawan Terhadap Agrowisata Belimbang Ngringinrejo." *Agrimics Journal* 1(2):45–62.
- Hidayatullah, MUhammad Arif, Hartuti Purnaweni, dan Teguh Yuwono. 2023. "Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang." *Pemerintahan dan Politik* 8(4):279–85.
- Kanita, Nina Widowati, dan Maesaroh. 2023. "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Goa Pidul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten GunungKidul." *Journal of Public Policy and Management Review* 12(4):1–18.
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025*.
- Kotaromalos, Amir Faisal, Joana Joanita Tuhumury, dan Nurainy Latuconsina. 2024. "Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Program Ekonomi Mikro di Desa Waehleru Kecamatan Baguala Kota Ambon." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5(1):166–80. doi: 10.55681/jige.v5i1.1799.
- Kusuma, V. F., & Wahyudi, K. E. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pecinan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. *Cakrawala Repository IMWI*, 6(6), 2454-2465.
- Lestari, Dwi, dan Mansur Azis. 2022. "Analisis Pengembangan Desa Wisata 'Ngebel Adventure Park.'" *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2(2):245–58.
- Matthoriq, A., Hidayat, Z., & Rahman, A. (2021). *Collaborative governance dalam tata kelola pariwisata desa (Studi pada Bumiaji Agrotourism di Kota Wisata Batu)*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP), 7(2), 234–248. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1146>
- Nanda, Della Dwi, Ahmad Suprastiyo, dan Junadi Junadi. 2024. "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Waduk Bendo di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6(3):2624–37. doi: 10.47467/reslaj.v6i3.6280.
- Novriansyah, M. Fajar, Maulana Mukhlis, & Budiono, Pitojo, dan Ni Kadek Poniasih. 2021. "Kolaborasi Pemerintah Kampung dengan Perusahaan Tapioka Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hasil Pengelolaan Singkong." *Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Komunikasi (JIPIKOM)* 3(2):81–91. doi: 10.31289/jipikom.v3i2.673.
- Puspita, Sindi, Junadi, dan Septi Wulandari. 2024. "Collaborative Governance dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Bojonegoro." *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*



8(1):16–26.

- Rosyanti, Erny, dan Riza Awal Novanto Dwian Hartomi Akta Padma Eldo. 2019. "Collaborative Governance Sebagai Upaya Dalam Akselerasi Pembangunan Desa (Studi Analisis Desa Pacul Kabupaten Tegal)." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 1(2):137–56.
- Soedarso, Muchammad Nurif, dan Windiani. 2014. "Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam dengan Pendekatan Marketing Places (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro)." *Jurnal Sosial Humanoria* 7(2):136–49.
- Sugiyono. 2023. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. diedit oleh S. Y. Suryandari. Bandung: Penerbit Alfabeta.